

## IMPLEMENTASI SPMI PADA PERGURUAN TINGGI ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN STUDI KASUS PENERAPAN SPMI PADA PERGURUAN TINGGI JAWA BARAT DAN BANTEN

Herlina Moris

[herlinamoris858@gmail.com](mailto:herlinamoris858@gmail.com)

Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki tantangan dan kesenjangan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi di Jawa Barat dan Banten, Indonesia. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif yang melibatkan wawancara, survei, dan analisis dokumen, penelitian ini mengeksplorasi persepsi para pemangku kepentingan mengenai efektivitas implementasi SPMI. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang kuat dari para pemimpin institusi, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, proses birokrasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak memadai menghambat realisasi penuh potensi SPMI. Penelitian ini juga menyoroti kesenjangan yang signifikan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual dari implementasi SPMI. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan strategi untuk meningkatkan efektivitas SPMI, termasuk meningkatkan alokasi sumber daya, menyederhanakan prosedur birokrasi, dan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SPMI dan memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

**Kata Kunci:** SPMI, Penjaminan Mutu Internal, Perguruan Tinggi, Jawa Barat, Banten, Mutu Pendidikan.

### ABSTRACT

*This study investigates the challenges and gaps in implementing the Internal Quality Assurance System (SPMI) in higher education institutions in West Java and Banten, Indonesia. Through a qualitative case study approach involving interviews, surveys, and document analysis, the study explores the perceptions of stakeholders regarding the effectiveness of SPMI implementation. The findings reveal that while there is a strong commitment from institutional leaders, challenges such as limited resources, bureaucratic processes, and inadequate stakeholder involvement hinder the full realization of SPMI's potential. The study also highlights a significant gap between the expected outcomes and the actual results of SPMI implementation. Based on the findings, the study recommends strategies to enhance SPMI effectiveness, including increasing resource allocation, simplifying bureaucratic procedures, and strengthening stakeholder engagement. The study contributes to a better understanding of the factors influencing SPMI implementation and provides valuable insights for policymakers and higher education institutions in Indonesia.*

**Keywords:** SPMI, Internal Quality Assurance, Higher Education, West Java, Banten, Educational Quality.

### PENDAHULUAN

Harapan dari penerapan SPMI adalah agar perguruan tinggi mampu menyediakan pendidikan berkualitas, sesuai dengan standar nasional maupun internasional, serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Namun, kenyataannya, banyak perguruan tinggi yang masih berjuang untuk mengimplementasikan SPMI secara efektif dan optimal. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan, serta lemahnya dukungan manajemen dan teknologi dalam proses penjaminan mutu.

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan global. Salah satu instrumen penting dalam memastikan kualitas pendidikan di perguruan tinggi adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Implementasi SPMI bertujuan agar setiap perguruan tinggi mampu menjaga standar mutu akademik dan non-akademik serta meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja.

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di luar negeri, terutama di negara-negara dengan sistem pendidikan tinggi yang maju, biasanya sudah terintegrasi dengan baik dalam kebijakan pendidikan dan pengelolaan institusi. Setiap negara memiliki pendekatan dan sistem berbeda untuk menjamin mutu pendidikan tinggi, namun beberapa prinsip inti tetap serupa dengan yang diterapkan di Indonesia, seperti peningkatan kualitas secara berkelanjutan, akuntabilitas, dan transparansi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan SPMI di beberapa negara.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Indonesia lahir sebagai respons terhadap kebutuhan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistematis. Dasar lahirnya SPMI dapat ditelusuri pada kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang ingin memastikan kualitas pendidikan sesuai dengan standar nasional. Salah satu landasan hukum penting adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, SPMI dipicu oleh tuntutan globalisasi, yang menuntut perguruan tinggi di Indonesia untuk lebih kompetitif dan relevan di tingkat internasional.

Di Amerika Serikat, penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur oleh lembaga akreditasi independen, dengan setiap institusi bertanggung jawab atas kualitasnya. Akreditasi memastikan standar kualitas terpenuhi, didukung oleh mekanisme internal yang mengevaluasi kurikulum, pengajaran, penelitian, dan layanan mahasiswa secara berkelanjutan. Fokus utama adalah pada pengukuran hasil belajar mahasiswa (*Assessment of Learning Outcomes*) untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, peninjauan eksternal (*External Reviews*) melalui *peer review* oleh akademisi luar dilakukan untuk menjaga objektivitas dan memastikan standar mutu terpenuhi.

Di Inggris, penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan oleh *Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)*, lembaga independen yang memastikan kualitas pendidikan di universitas. QAA mendukung pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berkelanjutan melalui mekanisme seperti audit internal oleh unit penjaminan mutu dan tinjauan rutin program akademik. Setiap program juga harus menjalani monitoring tahunan, melibatkan evaluasi mahasiswa dan tenaga pendidik untuk menilai kinerja dan pencapaian.

Di Jepang, *National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE)* bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan tinggi. Implementasi SPMI di Jepang melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri. Institusi pendidikan diharuskan melakukan evaluasi diri secara teratur untuk menilai pencapaian kualitas sesuai dengan standar nasional, yang kemudian diikuti oleh proses akreditasi oleh lembaga eksternal. Selain itu, kolaborasi dengan industri sangat ditekankan untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan ini menjadi bagian penting dari penilaian mutu internal.

Implementasi SPMI di luar negeri umumnya telah mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi dengan dukungan kebijakan yang kuat, sumber daya yang memadai, dan

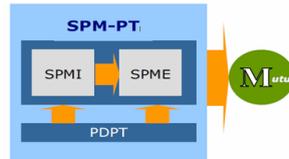
keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Meskipun ada variasi dalam pendekatan, semua negara berfokus pada evaluasi berkelanjutan, transparansi, dan perbaikan mutu secara berkesinambungan. Pembelajaran dari praktik internasional ini dapat menjadi acuan untuk memperkuat implementasi SPMI di Indonesia, terutama dalam hal keterlibatan pemangku kepentingan, sistem evaluasi berbasis bukti, dan kolaborasi yang lebih luas dengan sektor eksternal.

Namun, pada kenyataannya, implementasi SPMI sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Banyak perguruan tinggi, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten, menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan sistem ini. Beberapa di antaranya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan SPMI, serta belum optimalnya dukungan teknologi untuk mendukung proses penjaminan mutu. Selain itu, pemahaman yang kurang mendalam dari para pemangku kepentingan, baik pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, turut menjadi faktor penghambat dalam efektivitas implementasi SPMI.

Dalam konteks ini, penelitian tentang implementasi SPMI di perguruan tinggi Jawa Barat dan Banten sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan SPMI, serta untuk mengidentifikasi strategi yang dapat diambil untuk mengatasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi, sehingga mutu pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan masalah dari fenomena yang terjadi dapat dirumuskan masalah: Bagaimana implementasi SPMI sesuai harapan sesungguhnya di banding fakta yang terjadi pada Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Barat dan Banten? mengenai sejauh mana implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten telah memenuhi harapan yang ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam implementasi SPMI, serta mengeksplorasi persepsi para pemangku kepentingan terhadap implementasi SPMI. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami gap antara harapan dan kenyataan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi swasta di Indonesia khususnya kawasan Jawa Barat – Banten.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah proses sistemik yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjamin kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas dan Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP. Penjaminan mutu mencakup perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan terus-menerus (*continuous improvement*). Unit Penjaminan Mutu (UPM) berperan dalam sistem ini melalui tiga sub-sistem: (i) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, (ii) SPMI, dan (iii) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Tujuan SPMI adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, mendukung pencapaian visi perguruan tinggi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui pelaksanaan Tridharma. Melalui SPMI dan SPME, perguruan tinggi dapat secara komprehensif meningkatkan mutu secara berkelanjutan seperti dapat kita lihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi berfungsi sebagai panduan untuk pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan mutu di berbagai aspek pendidikan tinggi, baik akademik maupun non-akademik. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek kunci, termasuk masukan (input), proses, dan keluaran (output) dari pendidikan tinggi. Dalam hal masukan, kebijakan ini mencakup dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang akademik, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang efektif. PT wajib menggarisbawahi pentingnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai untuk memastikan kualitas pendidikan.

Pada bagian proses, kebijakan SPMI PTS mengacu pada standar pembelajaran yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran yang dijalankan harus berpusat pada mahasiswa (*Student-Centered Learning*) dengan menekankan pada pengembangan kompetensi kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya, seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang juga harus sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Sementara itu, untuk lulusan dan hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kebijakan SPMI di PTS Jawa Barat Banten menekankan pentingnya relevansi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Lulusan setiap Perguruan Tinggi diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan global, sehingga dapat berkontribusi dalam memajukan IPTEKS serta memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi masyarakat.

Sebagai implementasi dari kebijakan SPMI, Perguruan Tinggi juga mengatur prosedur dan manual SPMI yang mendukung pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Manual ini memastikan bahwa semua unit kerja di PT tersebut memiliki pedoman yang jelas untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga tercipta budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Berikut adalah ringkasan tahapan penetapan Standar SPMI:

### **1. Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan**

Menentukan kebutuhan internal dan eksternal institusi berdasarkan visi, misi, dan tuntutan pemangku kepentingan sebagai landasan penyusunan standar.

### **2. Pembentukan Tim Penyusun Standar**

Membentuk tim dari ahli akademik dan penjaminan mutu yang bertanggung jawab menyusun standar sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

### **3. Penyusunan Draft Standar**

Tim menyusun draft awal standar yang mencakup aspek input, proses, dan output sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

### **4. Konsultasi dan Umpan Balik**

Melakukan sosialisasi draft standar kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran guna meningkatkan kualitas standar.

### **5. Revisi dan Penyempurnaan**

Merevisi draft berdasarkan umpan balik untuk menghasilkan standar yang lebih

komprehensif, realistis, dan terukur.

## **6. Pengesahan Standar**

Standar final disahkan oleh pimpinan institusi, menjadikannya pedoman resmi dalam pelaksanaan SPMI.

## **7. Sosialisasi dan Implementasi**

Standar yang telah disahkan disosialisasikan dan diterapkan melalui kebijakan dan program di seluruh unit institusi.

## **8. Monitoring dan Evaluasi**

Secara berkala memantau dan mengevaluasi implementasi standar untuk memastikan pencapaian mutu serta melakukan perbaikan bila diperlukan.

Tahapan ini memastikan standar SPMI ditetapkan dan diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan mutu perguruan tinggi.

Setiap Standar SPMI dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). SOP adalah mekanisme yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan isi Standar SPMI. Tujuan utama SOP adalah meningkatkan efektivitas kinerja seluruh unit kerja serta menjadi alat komunikasi untuk pelaksanaan aktivitas yang sesuai dengan Kebijakan dan Standar SPMI. SOP disusun dalam bentuk buku pedoman yang digunakan di tingkat universitas, fakultas, lembaga, dan unit kerja lainnya untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

Formulir (Borang) berfungsi sebagai dokumen pencatat pelaksanaan aktivitas, baik di bidang akademik maupun non-akademik, serta mencatat temuan dari kegiatan monitoring, evaluasi, audit internal, dan kaji ulang. Formulir ini mencakup seluruh unit kerja di PT, dan berfungsi sebagai alat rekam terhadap pelaksanaan Standar SPMI. Kebijakan SPMI menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi standar yang ditetapkan. Seluruh pihak di PT, baik akademik maupun non-akademik, diharapkan berkomitmen menjalankan penjaminan mutu demi percepatan mencapai tujuan baik itu Universitas, Institut atau Akademi bahkan Politeknik. Audit internal dilakukan untuk mengukur kepatuhan dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI di PT, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan digunakan sebagai persiapan akreditasi. Audit Internal PT bertanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja, sesuai dengan standar audit internal yang telah ditetapkan.

Secara garis besar, tahapan pengendalian Standar SPMI melalui Audit Internal terdiri dari beberapa langkah penting:

1. **Perencanaan Audit:** Tahap awal adalah merencanakan audit, termasuk menetapkan jadwal audit, unit kerja yang akan diaudit, dan auditor internal yang bertanggung jawab. Perencanaan ini harus mencakup lingkup audit, tujuan, dan kriteria yang akan digunakan.
2. **Pelaksanaan Audit:** Pada tahap ini, auditor internal melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap pelaksanaan Standar SPMI di setiap unit kerja. Proses ini melibatkan pengumpulan data, wawancara, observasi, serta pemeriksaan dokumen dan borang terkait standar mutu.
3. **Analisis dan Penilaian:** Auditor melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menilai sejauh mana standar yang telah ditetapkan tercapai. Auditor mengevaluasi apakah setiap unit kerja mematuhi standar dan prosedur yang berlaku serta mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian.
4. **Laporan Audit:** Setelah evaluasi, auditor menyusun laporan audit yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini disampaikan kepada unit kerja yang diaudit serta pimpinan institusi untuk perbaikan lebih lanjut.

5. Tindak Lanjut (Follow-Up): Tahap akhir adalah menindaklanjuti hasil audit. Unit kerja yang diaudit harus mengambil tindakan korektif atas temuan audit untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Auditor internal melakukan monitoring untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan dan berjalan sesuai rekomendasi.

Melalui tahapan-tahapan ini, Audit Internal membantu memastikan bahwa pelaksanaan Standar SPMI sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kualitas dan kinerja institusi.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki hubungan erat dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) institusi. SPMI memastikan bahwa semua proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi institusi, sehingga setiap unit kerja dapat bergerak secara sistematis menuju pencapaian tersebut. SPMI mendukung tujuan strategis institusi dengan menetapkan standar mutu yang fokus pada target kinerja di bidang akademik dan non-akademik. Melalui proses audit, evaluasi, dan monitoring, mutu layanan pendidikan dapat dikendalikan agar konsisten dengan VMTS. SPMI juga menjamin keselarasan program-program yang dilaksanakan dengan VMTS, termasuk pengembangan kurikulum yang mendukung kompetensi lulusan sesuai visi dan misi. Selain itu, SPMI mendorong perbaikan berkelanjutan, memungkinkan institusi menyesuaikan strategi dan kebijakan agar tetap relevan dengan perkembangan. Secara keseluruhan, SPMI berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mencapai VMTS institusi dengan memastikan kualitas proses yang terukur dan dapat ditingkatkan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi, terutama jika dilihat dari sembilan standar yang ditetapkan oleh BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri). Berikut adalah beberapa kontribusi SPMI terhadap masing-masing standar:

#### **1. Standar 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

SPMI membantu merumuskan dan mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi secara jelas. Dengan adanya SPMI, institusi dapat memastikan bahwa semua kegiatan dan program studi berorientasi pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

#### **2. Standar 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama**

SPMI menyediakan kerangka untuk tata pamong dan tata kelola yang baik, yang mencakup pengaturan dan pengelolaan sumber daya. Ini juga mencakup pengembangan kerjasama dengan institusi lain, yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.

#### **3. Standar 3: Mahasiswa**

Melalui SPMI, institusi dapat mengembangkan proses seleksi, penerimaan, dan pengembangan mahasiswa yang sistematis, serta menyediakan layanan yang mendukung keberhasilan akademik dan non-akademik mahasiswa.

#### **4. Standar 4: Sumber Daya Manusia**

SPMI memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia, termasuk dosen dan tenaga kependidikan, dilakukan dengan baik. Ini mencakup pengembangan kompetensi, pelatihan, dan evaluasi kinerja, sehingga tenaga pengajar memenuhi kriteria yang diperlukan untuk akreditasi.

#### **5. Standar 5: Kurikulum dan Pembelajaran**

SPMI berperan dalam pengembangan dan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan standar nasional. Ini mencakup penilaian efektivitas pembelajaran dan penyesuaian

kurikulum berdasarkan umpan balik yang diterima.

#### **6. Standar 6: Penelitian**

SPMI membantu mendorong pengembangan penelitian yang berkualitas dengan menilai relevansi dan dampaknya. Ini mencakup kebijakan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi di masyarakat.

#### **7. Standar 7: Pengabdian kepada Masyarakat**

SPMI memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terencana dan terukur. Ini juga mencakup penilaian dampak dari kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

#### **8. Standar 8: Sarana dan Prasarana**

SPMI mengevaluasi kecukupan dan kualitas sarana serta prasarana yang ada, memastikan bahwa semua fasilitas mendukung proses pembelajaran dan kegiatan akademik.

#### **9. Standar 9: Sistem Penjaminan Mutu**

SPMI itu sendiri adalah bagian dari sistem penjaminan mutu yang diterapkan di institusi. Ini mencakup monitoring, evaluasi, dan audit internal untuk memastikan bahwa semua standar yang ditetapkan dipatuhi dan terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai akreditasi, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang mendukung peningkatan kualitas secara berkelanjutan di semua aspek perguruan tinggi dan program studi. Dengan demikian, SPMI berkontribusi terhadap pencapaian akreditasi yang lebih baik dan memastikan bahwa institusi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh BAN PT atau LAM.

### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPMI serta kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

#### **A. Desain Penelitian**

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan SPMI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode ini memungkinkan penggalian data yang lebih komprehensif terkait persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan tinggi. Metode studi kasus digunakan untuk mendapatkan gambaran rinci mengenai implementasi SPMI di beberapa perguruan tinggi, sehingga memungkinkan identifikasi faktor-faktor spesifik yang menyebabkan perbedaan antara harapan dan kenyataan. Menurut Creswell (2014) dalam bukunya *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna dari fenomena yang sedang dipelajari dengan mendalami perspektif dari partisipan.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten yang telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sedangkan sampel dari penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yakni beberapa perguruan tinggi yang secara spesifik menghadapi tantangan dalam penerapan SPMI. Pemilihan sampel ini didasarkan pada kriteria seperti besaran institusi, tingkat implementasi SPMI, dan variasi tantangan yang dihadapi. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan partisipan dari kalangan pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan staf terkait penjaminan mutu.

### C. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen akan diolah dengan mengidentifikasi masalah-masalah utama yang terkait dengan tantangan dan kesenjangan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Setelah itu diidentifikasi, data akan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan pemerintah untuk penjaminan mutu. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dengan menggabungkan hasil dari berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan dokumen) untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi SPMI. Braun & Clarke (2006), yang banyak digunakan sebagai acuan dalam metode ini di berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, psikologi, dan pendidikan. Penelitian mereka membantu peneliti dalam memahami bagaimana mengidentifikasi tema-tema utama dari data kualitatif dan menerapkan metode ini dalam konteks penelitian yang lebih luas.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Data dikumpulkan melalui beberapa metode: Survei Kuesioner: Instrumen ini digunakan untuk mengukur persepsi staf dan stakeholder terkait faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, finansial, partisipasi, dan teknologi. Survei juga akan menilai kepercayaan mereka terhadap kualitas mutu pendidikan serta dampak perubahan regulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada perguruan tinggi di Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara, survei, dan observasi, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

### 1) Tabel Responden

Tabel 1. Responen

No.	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Status Pekerjaan	Lama Bekerja di Perguruan Tinggi
1	Laki-laki	25-30 tahun	S2	Dosen	1 tahun
2	Perempuan	31-35 tahun	S1	Dosen	5 tahun
3	Laki-laki	20-24 tahun	S1	Mahasiswa	-
4	Perempuan	26-30 tahun	S2	Tenaga Kependidikan	2 tahun
5	Laki-laki	36-40 tahun	S3	Dosen	10 tahun

Berdasarkan tabel responden yang diberikan, berikut adalah analisis kondisi responden yang berjumlah 48 responden dari sisi jabatan, lama bekerja di perguruan tinggi, dan unit kerja:

- a. **Keterlibatan yang Luas dalam Penjaminan Mutu (SPMI):** Sebagian besar responden menduduki posisi penting dalam penjaminan mutu, seperti Ketua SPMI, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, dan Ketua LPM (Lembaga Penjaminan Mutu). Ini menunjukkan bahwa responden adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam implementasi dan pengawasan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi masing-masing. Dengan begitu, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas pendidikan.

- b. **Pengalaman yang Bervariasi:** Lama bekerja responden bervariasi dari 1 tahun hingga lebih dari 28 tahun. Mayoritas memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun, dengan beberapa responden berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang penjaminan mutu. Pengalaman yang panjang ini penting karena memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam terhadap sistem SPMI dan bagaimana mengatasi tantangan yang ada di perguruan tinggi.
- c. **Jabatan dan Unit Kerja yang Beragam:** Responden berasal dari berbagai unit kerja, termasuk Program Studi, Fakultas, dan LPM di berbagai bidang seperti Keperawatan, Manajemen Informatika, Psikologi, Pendidikan, Ekonomi, Perhotelan, dan banyak lagi. Keberagaman ini menunjukkan bahwa SPMI diimplementasikan di seluruh aspek akademik di berbagai jenis program studi dan fakultas. Ini penting untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga di semua level institusi.
- d. **Potensi Kesenjangan dalam Pengalaman:** Beberapa responden memiliki pengalaman yang relatif singkat dalam penjaminan mutu (kurang dari 5 tahun), yang bisa menjadi tantangan dalam hal pemahaman menyeluruh dan kemampuan mengimplementasikan kebijakan penjaminan mutu secara efektif. Pelatihan dan pengembangan lebih lanjut bisa membantu mengatasi kesenjangan pengalaman ini.
- e. **Komitmen terhadap Penjaminan Mutu:** Responden yang menduduki posisi tinggi di lembaga penjaminan mutu dan berpengalaman lebih dari 10 tahun menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap penerapan SPMI. Posisi mereka yang strategis memungkinkan mereka untuk menjadi motor penggerak dalam peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola institusi.

Secara keseluruhan, kondisi responden dalam tabel menunjukkan bahwa perguruan tinggi **memiliki tenaga ahli** yang berpengalaman dalam penjaminan mutu, namun tetap ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut, khususnya terkait **pengalaman dan pelibatan staf yang lebih muda** atau baru di bidang SPMI.

## 2) Analisa jawaban responden dari masing-masing pertanyaan

Tabel 2 Jawaban Responden

No	Pertanyaan	Indikator %					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Seberapa baik pimpinan perguruan tinggi memahami konsep dan tujuan dari SPMI?	17.4	43.5	28.3	10.9	0	74%
2	Seberapa besar komitmen pimpinan dalam mendukung implementasi SPMI?	26.1	32.6	32.6	8.7	0	75%
3	Apakah jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI sudah memadai?	8.7	23.9	32.6	28.3	6.5	60%
4	Bagaimana Anda menilai kualitas SDM yang terlibat dalam implementasi SPMI?	10.9	28.3	50	8.7	2.2	67%
5	Apakah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan SPMI sudah mencukupi?	6.5	10.9	45.7	28.3	8.7	56%
6	Apakah proses birokrasi dalam pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi terlalu kompleks?	13	26.1	43.5	10.9	6.5	66%
7	Seberapa aktif dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan terlibat dalam proses SPMI?	10.9	23.9	34.8	28.3	2.2	63%
8	Apakah teknologi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan SPMI sudah	4.3	28.3	34.8	30.4	2.2	60%

	memadai?						
9	Bagaimana Anda menilai tingkat transparansi dalam proses evaluasi mutu di perguruan tinggi?	15.2	37	34.8	8.7	4.3	70%
10	Seberapa sering perubahan regulasi nasional memengaruhi pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi?	15.2	23.9	50	10.6	0	69%
11	Apakah SPMI sudah terintegrasi dengan baik ke dalam visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) perguruan tinggi serta persyaratan BAN-PT/LAM?	13	37	32.6	13	4.3	68%
12	Apakah implementasi SPMI telah berhasil meningkatkan standar mutu pendidikan di perguruan tinggi?	15.2	34.8	39.1	10.9	0	71%
13	Bagaimana Anda menilai akuntabilitas dan transparansi dalam proses evaluasi mutu di perguruan tinggi?	15.2	37	39.1	6.5	2.2	71%
14	Sejauh mana SPMI berkontribusi terhadap tata kelola perguruan tinggi yang efektif?	26.1	32.6	32.6	6.5	2.2	75%
15	Apakah ada peningkatan yang signifikan dalam kualitas pendidikan setelah penerapan SPMI?	15.2	41.3	39.1	2.2	2.2	73%
	Variabel Independen Pertanyaan 1-11						66%
	Variabel Dependen 12-15						72%

Hasil survei terkait implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi Jawa Barat dan Banten menunjukkan beberapa temuan penting:

Dari segi pemahaman dan komitmen kepemimpinan, 74% responden menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan tujuan SPMI. Selain itu, 75% responden menilai bahwa ada komitmen kuat dari pimpinan dalam mendukung implementasi SPMI, menunjukkan dukungan yang signifikan dari pihak manajemen.

Namun, tantangan utama tampak pada keterlibatan sumber daya manusia (SDM) dalam proses ini. Hanya 60% responden yang menilai bahwa jumlah dan kualifikasi SDM yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI sudah memadai. Di sisi lain, 67% responden menilai bahwa kualitas SDM yang terlibat dapat diterima, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan dalam jumlah dan kualifikasi SDM.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kecukupan anggaran yang dialokasikan untuk implementasi SPMI, di mana hanya 56% responden merasa bahwa anggaran sudah cukup. Selain itu, 66% responden menyatakan bahwa birokrasi dalam pelaksanaan SPMI masih terlalu kompleks, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam penyederhanaan proses administrasi.

Partisipasi pemangku kepentingan, seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, juga menjadi tantangan, dengan 63% responden menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam proses SPMI sudah cukup. Penggunaan teknologi untuk mendukung pelaksanaan SPMI juga masih bisa ditingkatkan, karena hanya 60% yang menilai teknologi yang ada sudah memadai.

Meskipun demikian, aspek transparansi dalam evaluasi mutu mendapat penilaian positif, di mana 70% responden merasa proses evaluasi mutu di perguruan tinggi sudah transparan, dan 71% menilai akuntabilitas dan transparansi dalam evaluasi mutu sudah baik.

Pengaruh perubahan regulasi nasional juga terasa dalam implementasi SPMI, dengan

69% responden yang menyatakan bahwa perubahan regulasi nasional berdampak pada pelaksanaan SPMI. Selain itu, 68% responden menilai bahwa SPMI sudah terintegrasi dengan baik ke dalam visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, dampak SPMI terhadap peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi dinilai positif, dengan 71% responden yang merasa bahwa implementasi SPMI telah berhasil meningkatkan standar mutu pendidikan. SPMI juga dinilai berkontribusi terhadap efektivitas tata kelola perguruan tinggi, dengan 75% responden yang menyatakan bahwa SPMI telah membantu dalam memperbaiki tata kelola. Akhirnya, 73% responden mencatat adanya peningkatan yang signifikan dalam kualitas pendidikan setelah penerapan SPMI di perguruan tinggi.

Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya dukungan berkelanjutan dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan penyederhanaan proses birokrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPMI di perguruan tinggi.

Hasil analisa data dengan menggunakan SPSS 29 dapat menunjukkan bahwa:

- Standar deviasi** (atau simpangan baku) adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh data dalam satu set data tersebar dari nilai rata-rata (mean) dari set data tersebut. Sederhananya, standar deviasi menunjukkan seberapa "menyebarkan" data-data tersebut.

	N	Mean	Std. Deviation
X1.1	48	3.6875	.87898
X1.2	48	3.7708	.92804
X1.4	48	3.3750	.86603
X1.3	48	2.1875	.67339
X1.5	48	2.7708	.97281
X1.6	48	3.2500	.75794
X1.7	48	3.1250	1.02366
X1.8	48	3.0208	.93375
X1.9	48	3.4792	1.01036
X1.10	48	3.4167	.87113
X1.11	48	3.3958	1.02604
Y1.1	48	3.5208	.89893
Y1.2	48	3.5417	.92157
Y1.3	48	3.7292	1.02604
Y1.4	48	3.6458	.88701
Valid N (listwise)	48		

**Jumlah Sampel Konsisten:** Semua variabel memiliki jumlah sampel yang sama, yaitu 48. Ini menunjukkan bahwa tidak ada data yang hilang atau tidak lengkap untuk variabel-variabel tersebut.

**Rata-rata Berbeda:** Rata-rata untuk setiap variabel berbeda-beda, menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki karakteristik yang unik.

**Variabilitas Berbeda:** Standar deviasi untuk setiap variabel juga berbeda-beda, menunjukkan bahwa tingkat sebaran data untuk setiap variabel tidak sama. Beberapa variabel memiliki data yang lebih tersebar (standar deviasi besar), sementara yang lain memiliki data yang lebih terpusat (standar deviasi kecil).

Untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan dapat dilihat dari hasil selisih antara harapan dan kenyataan dari tabel berikut:

Variabel Independen

Variabel	Harapan	Kenyataan	Selisih
X1.1	4.195	3.301	0.894
X1.2	4.063	3.194	0.869
X1.3	3.248	2.532	0.716
X1.4	3.897	3.059	0.838
X1.5	2.848	2.205	0.643
X1.6	4.288	3.376	0.912
X1.7	3.053	2.372	0.681
X1.8	3.235	2.521	0.714
X1.9	3.443	2.691	0.752
X1.10	3.922	3.08	0.842
X1.11	3.31	2.582	0.728
Average	3.591	2.810	0.781
Max	4.288	3.376	0.912
Min	2.848	2.205	0.643

Variabel Dependen

Variabel	Harapan	Kenyataan	Selisih
Y1.1	3.917	3.075	0.842
Y1.2	3.843	3.016	0.827
Y1.3	3.635	2.846	0.789
Y1.4	4.11	3.232	0.878
Average	3.876	3.042	0.834
Max	4.110	3.232	0.878
Min	3.635	2.846	0.789

### **1. X1.1 hingga X1.11:**

- Rata-rata harapan untuk variabel X1 berada pada rentang yang lebih tinggi yaitu 3.591 dibandingkan kenyataan 2.810, dengan selisih yang cukup signifikan yaitu 0.728.
- Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara apa yang diharapkan oleh partisipan dan kenyataan yang mereka alami terkait variabel-variabel X1.
- Secara umum, harapan jauh lebih tinggi daripada kenyataan, yang bisa mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap hasil aktual dibandingkan ekspektasi

### **2. Y1.1 hingga Y1.4:**

- Pola serupa terlihat pada variabel Y1, di mana rata-rata harapan untuk setiap variabel 3.876 lebih tinggi daripada kenyataan 2.810.
- Selisih antara harapan dan kenyataan menunjukkan adanya gap, yang mengindikasikan ketidakcocokan antara apa yang diharapkan dan hasil nyata yang dirasakan sebesar 0.834.
- Hal ini mungkin mencerminkan adanya ruang untuk perbaikan atau peningkatan kualitas dalam hal variabel yang diukur pada dimensi Y1.

Dari perbandingan antara harapan dan kenyataan di semua variabel (X1 dan Y1), terlihat jelas bahwa harapan selalu lebih tinggi dibandingkan kenyataan. Selisih antara harapan dan kenyataan ini menandakan adanya ketidakpuasan di beberapa aspek, baik di ranah X1 maupun Y1. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi dan realisasi, yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi lebih lanjut guna meningkatkan aspek-aspek yang dianggap penting oleh partisipan. Dengan memperkecil selisih tersebut, diharapkan kepuasan dapat lebih terwujud di masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa perlu ada usaha untuk menyelaraskan harapan dan kenyataan dengan meningkatkan kinerja atau kualitas pada variabel-variabel yang mengalami kesenjangan besar.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan tantangan dan kesenjangan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi di Jawa Barat dan Banten. Beberapa simpulan penting yang dapat ditarik dari hasil ini adalah:

- 1) **Komitmen dan Pemahaman Pimpinan:** Sebagian besar responden (74%) menilai bahwa pimpinan perguruan tinggi memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep SPMI dan 75% menyatakan adanya komitmen kuat dari pimpinan dalam mendukung implementasi SPMI. Hal ini mencerminkan pentingnya peran kepemimpinan dalam menjamin mutu pendidikan.
- 2) **Kualitas dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM):** Terdapat tantangan dalam kualifikasi SDM yang terlibat dalam SPMI, di mana hanya 60% responden menilai SDM sudah memadai dari segi jumlah dan kualitas. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan dan penambahan SDM yang berkualifikasi di bidang penjaminan mutu.
- 3) **Keterbatasan Anggaran:** Hanya 56% responden merasa bahwa anggaran yang dialokasikan sudah cukup. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan SPMI yang efektif.
- 4) **Birokrasi yang Kompleks:** Sebanyak 66% responden menyatakan bahwa birokrasi dalam pelaksanaan SPMI masih terlalu rumit. Hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan prosedur administrasi agar implementasi SPMI lebih efisien.
- 5) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi

mutu mendapat penilaian positif, dengan 71% responden yang menilai proses evaluasi sudah berjalan dengan baik.

- 6) Kesenjangan Harapan dan Kenyataan: Perbandingan antara harapan dan kenyataan menunjukkan adanya selisih signifikan. Pada variabel X1 (elemen-elemen terkait implementasi), rata-rata harapan sebesar 3.591 lebih tinggi dari kenyataan sebesar 2.810 dengan selisih 0.781. Sementara pada variabel Y1 (hasil implementasi), rata-rata harapan sebesar 3.876 lebih tinggi dari kenyataan sebesar 3.042 dengan selisih 0.834. Ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk perbaikan dalam implementasi SPMI, di mana ekspektasi para responden belum sepenuhnya terpenuhi.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam implementasi SPMI, terdapat tantangan yang signifikan, khususnya dalam hal keterlibatan SDM, alokasi anggaran, serta penyederhanaan proses birokrasi.

#### **Saran:**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPMI di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pelatihan SDM: Meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam penjaminan mutu melalui pelatihan yang lebih intensif dan komprehensif. Selain itu, perlu dilakukan perekrutan SDM tambahan untuk memastikan bahwa jumlah dan kualifikasinya memadai.
- 2) Penambahan Anggaran: Alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mendukung program SPMI sangat penting. Institusi perlu meninjau kembali alokasi anggaran untuk memastikan bahwa setiap aspek implementasi SPMI mendapat dukungan finansial yang cukup.
- 3) Penyederhanaan Proses Birokrasi: Perlu adanya upaya untuk menyederhanakan prosedur birokrasi yang terkait dengan pelaksanaan SPMI. Dengan birokrasi yang lebih efisien, diharapkan proses implementasi bisa berjalan lebih lancar dan cepat.
- 4) Penggunaan Teknologi: Meningkatkan penggunaan teknologi dalam mendukung pelaksanaan SPMI, termasuk pengembangan sistem digital untuk manajemen mutu dan evaluasi kinerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- 5) Penguatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Meningkatkan keterlibatan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam proses SPMI agar semua pihak memiliki pemahaman yang baik dan berkomitmen terhadap penjaminan mutu.
- 6) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SPMI guna mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan, serta menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan regulasi nasional dan kebutuhan institusi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perguruan tinggi dapat memperkecil kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2021). Standar Akreditasi Perguruan Tinggi 2021. Jakarta: BAN-PT.
- Budiarti, R. & Nuryani, A. (2023). Kendala dan Solusi dalam Penerapan SPMI pada Perguruan Tinggi di Jawa Barat dan Banten. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2020(2), 75-88.
- Hidayati, S. & Firmansyah, D. (2023). Pengaruh SPMI terhadap Kualitas Pendidikan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 10(4), 200-215.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2019). Laporan Evaluasi Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.

- Mulyani, S., & Rahman, A. (2022). Persepsi Dosen dan Mahasiswa terhadap SPMI di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(3), 120-135.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sujono, A., & Pratiwi, N. (2022). Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Negeri. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 15(1), 45-60.